

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA SINDANGASIH KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019

Mira Andriani

E-mail: mirayasjayawiharna@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan
STISIP Bina Putera Banjar

ABSTRAK

Berdasarkan hasil observasi diketahui permasalahan pokok penelitian ini adalah kemiskinan di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis yang masih belum tersentuh oleh Pemerintah. Dengan demikian informasi program PKH belum menyeluruh; Masih banyaknya sumber daya manusia (SDM) yang tidak memiliki keterampilan dan keahlian, sebagai dasar untuk meningkatkan taraf hidupnya; dan Paradigma masyarakat yang masih belum berubah dan cenderung ingin terus- menerus diberi bantuan oleh pemerintah tanpa adanya upaya untuk meningkatkan taraf hidupnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang mendeskripsikan data-data yang ada, situasi yang dialami dan proses pemecahan masalah yang sedang berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di harapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal usaha). Artinya, Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sindangasih Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis sebagai program yang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kesejahteraan

ABSTRACT

Based on observations known to the subject matter of this research is high rate of poverty and welfare conditions community both in health and in education. Location of the research was conducted in the Sub District Banjarsari District Ciamis. This research used qualitative method. The method used in this research is descriptive method, which describe the data that exist, the situation experienced, and the take place process for solving problems. The result showed that in the short term grants Program Keluarga Harapan (PKH) is expected to the reduce the burden of household spending (the impact of direct consumption), and in the long term is an investment in future generations better thought improved health and education (the impact of the development of venture capital). That is, the Policy Implementation Program Keluarga Harapan (PKH) in the village of sindangasih district Banjarsari district Ciamis as a program capable of breaking the cycle of intergenerational poverty.

Keywords: Implementation Policy, Welfare

PENDAHULUAN

Kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh seluruh negara di dunia. Masalah kemiskinan ini bukan hanya berada pada negara-negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga negara-negara

maju. Masalah kemiskinan ini bersifat kompleks dan multi dimensional, dimana hal ini berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk

terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 255 juta jiwa, serta dengan aneka ragam budaya dan kelas sosial (BPS, 2015), membuat Indonesia rentan terhadap masalah ekonomi yang berdampak langsung pada kemiskinan.

Nazara (dalam Nurwati, 2008:05), mengemukakan lima faktor yang dianggap dapat mempengaruhi terjadinya kemiskinan, yaitu : (1) pendidikan, (2) Jenis Pekerjaan, (3) Gender, (4) Akses terhadap pelayanan kesehatan dasar, dan (5) Infrastruktur dan lokasi geografis. Faktor-faktor tersebut ada keterkaitan satu sama lainnya yang membentuk lingkaran kemiskinan.

Kemiskinan ini seyogyanya digambarkan dengan kondisi seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan dan papan. Kurangnya pendapatan mengakibatkan seseorang memiliki kualitas hidup yang rendah. Hal ini disebabkan karena orang miskin tidak mempunyai biaya untuk mengakses berbagai layanan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kemiskinan telah membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai, mengakses kesehatan terjamin dan kemiskinan menjadi alasan rendahnya indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

Melihat cita-cita luhur yang tertuang dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 untuk mensejahterakan masyarakat dalam berbagai aspek, maka pemerintah membuat kebijakan dalam bentuk program-program bantuan sosial yang ada. Harapan evaluasi terhadap program-program pengentasan

kemiskinan yang sering kali mengalami kegagalan serta peningkatan efektivitas dari penanggulangan kemiskinan muncul kembali seiring adanya program kebijakan bantuan sosial yang akan peneliti bahas yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

PKH mulai dilaksanakan pertama kali pada tahun 2007 di 7 provinsi, 48 kabupaten/ kota dan melayani 387.928

KSM di Indonesia, kemudian berkembang pada tahun 2011 menjadi 25 provinsi 118 kabupaten/kota dan melayani 1,1 juta KSM, hal ini diharapkan menjadi program yang berkesinambungan sampai tahun 2016 dan mampu untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals/MDGS*).

UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 2011. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi Negara untuk dapat hidup secara layak terutama meningkatnya kesejahteraan sosial Fakir miskin. Sasarannya meningkatkan kesejahteraan sosial Fakir miskin ini memiliki indikator jumlah keluarga Fakir miskin yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan jumlah Fakir miskin yang telah mengakses fasilitas pelayanan dasar. Indikator ini dapat dicapai melalui perlindungan dan jaminan sosial dengan kebijakan dari pemerintah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” dan Ayat 2 berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan”.

Program Keluarga Harapan (PKH) dijalankan sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial. Undang- Undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosia. Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan. Perpres No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Program ini memberikan bantuan berupa uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan catatan mengikuti persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan itu terkait dengan

peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu kesehatan dan pendidikan. Sasaran dari program ini yakni ibu hamil, ibu menyusui, anak balita dan anak sekolah usia sekolah setingkat SD-SMP.

Penerimaan bantuan ini adalah ibu atau wanita yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan. Angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Banjarsari, masih terbilang cukup tinggi. Bahkan masih banyak warga miskin yang belum pernah tersentuh bantuan pemerintah. Hak-hak bagi keluarga yang punya kartu PKH diantaranya BSM untuk keluarga yang punya anak sekolah, Kartu Indonesia Sehat atau BPJS, pendidikan gratis minimal 12 tahun, Beras (Rasta), rumah layak huni atau bedah rumah, modal untuk usaha bersama dengan syarat usahanya harus sudah berjalan terlebih dahulu, dan banyak lagi yang lainnya.

Program Keluarga Harapan (PKH) juga diwajibkan mengadakan pertemuan atau sosialisasi setiap satu bulan sekali, untuk sekedar mengecek sampai atau tidaknya hak keluarga harapan, sekaligus menjalani tali silaturahmi. Masih banyak keluarga miskin yang tidak mendapatkan bantuan yang layak dari pemerintah. Seharusnya pemerintah setempat lebih jeli lagi memperhatikan hal ini, jangan sampai ada yang terlewat, atau bahkan tidak tepat sasaran.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam pelaksanaan Program PKH demi kelancaran Program ini dikemudian hari.

LANDASAN TEORI

Implementasi Kebijakan

Dalam arti seluas-luasnya, implementasi sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholder*) aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur dan teknik secara sinergis yang digerakan untuk

bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki.

Mazmanian dan Sabatier (1983: 5) telah merumuskan proses implementasi kebijakan publik ini dengan lebih rinci, yaitu "Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan peradilan. Proses ini berlangsung setelah sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari *output* tersebut dapat keputusan sebagaimana dipersiapkan oleh badan-badan yang mengambil keputusan dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan yang bersangkutan".

Implementasi sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholder*) aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur dan teknik secara sinergis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki.

Terdapat beberapa konsep mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Secara etimologis, implementasi. Menurut kamus Webster merumuskan bahwa istilah *to implement* (pengimplementasikan) itu berarti *to provide the means for carryng out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang dilakukannya. Selain itu kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber daya

Tanpa sumber daya yang memadai tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya merupakan faktor penting selain dari komunikasi dalam implementasi kebijakan agar kebijakan dapat berjalan dengan sesuai serta dengan apa yang diharapkan.

3. Disposisi

Yang dimaksud disini adalah menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti, keluarga, sifat demokratis dan sebagainya. Tanpa disposisi dan implementor yang baik maka kebijakan yang dijalankannya tidak dapat berjalan dengan baik demikian sebaliknya.

4. Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan struktur yang mengimplementasi kebijakan. Birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan kualitatif, menurut Sugiyono (2017: 9) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*. Jadi tujuan utama penelitian kualitatif adalah penelitian

yang bermaksud untuk memahami fenomena alamiah atas keunikan, dinamika dan hakikat holistik dari kehadiran manusia dan interaksinya dengan lingkungan dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Sementara itu metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Menurut Sugiyono (2017: 35) “metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain”. Dengan kata lain dapat disimpulkan sebagai sebuah metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan di lapangan secara sistematis dengan fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat dan data yang saling berhubungan, serta bukan hanya untuk mencari kebenaran mutlak tetapi pada hakekatnya mencari pemahaman observasi.

Secara etimologi informan adalah orang pemberi informasi atau orang yang memeberikan informasi. Informan menurut Kamus bahasa Indonesia (2008: 586), bahwa “Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian yang dijadikan narasumber”.

Kesimpulannya, informan di tentukan dan di tetapkan tidak berdasarkan pada jumlah yang dibutuhkan, melainkan berdasarkan pertimbangan fungsi dan peran sesuai fokus penelitian. Adapun sampel purposive (*informan*) pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa Sindangasih
2. Pendamping PKH
3. Kepala Sekolah Sindangasih

4. Penerima Bantuan PKH

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan faktor – faktor yang mempengaruhi kebijakan dari Edward III, antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH)

a) Komunikasi

Salah satu syarat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini ialah faktor komunikasi yang digunakan, baik itu komunikasi secara tersirat maupun secara formil tersurat, komunikasi digunakan sebagai alat bantu dalam upaya pengimplementasi kegiatan tersebut, sehingga dengan upaya komunikasi yang intensif dan linear akan berdampak positif terhadap kelancaran kegiatan tersebut dari tingkat atas sampai tingkat pelaksana.

Tetapi, program ini belum sepenuhnya maksimal karena keterbatasan, kemampuan masyarakat dalam menyikapi terkait dengan informasi pendistribusian bantuan tersebut dilapangan. Karena, informasi yang diberikan kepada masyarakat itu sifatnya informasi yang melalui media elektronik (Handphone) atau pun melalui pemerintah desa.

b) Sumber Daya

Syarat berjalanya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya (*resource*). Menurut Edward III dalam Agustino (2006: 158 – 159), sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Respon positif pun seringkali didapatkan oleh pendamping yang menurut masyarakat sudah sangat mumpuni sumberdayanya dalam mengakomodir pelayanan masyarakat di dalam program PKH, Karena dengan basic sarjana para pendamping tersebut punya kapabilitas

memaksimalkan program serta meminimalisir kesalahan-kesalahan program PKH.

c) Disposisi/Sikap

Disposisi yang dimaksud disini adalah menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti: kejuruan, sifat demokratis, dan sebagainya. Tanpa disposisi dari implementor yang baik maka kebijakan yang dijalankannya tidak dapat berjalan dengan baik Syarat berjalanya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya (*resource*). Menurut Edward III dalam Agustino (2006: 158 – 159), sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator – indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari staf, informasi, wewenang dan fasilitas, yang dijalankannya tidak dapat berjalan dengan baik, demikian sebaliknya. Berdasarkan narasumber program PKH in terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi masyarakatnya, terutama masalah kemiskinan. Dalam hal ini disposisi/sikap jelas terarah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku sehingga sikap dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan akan memunculkan sebuah kebijakan yang nantinya akan berdampak secara langsung kepada program PKH dan masyarakat penerima program PKH.

d) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah ditentukan dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Berdasarkan narasumber program PKH di kecamatan banjarsari pada dasarnya tidak memerlukan pembenahan secara signifikan tapi tentunya merupakan suatu keharusan dalam hal pembenahan pada struktur birokrasi yang melekat pada suatu pemerintahan dari tingkatan yang tinggi sampai tingkat bawah, karena pelaksanaan program PKH ini sangat kental terhadap dampak birokrasi yang merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji sebuah kebijakan baru.

Hambatan–Hambatan dalam Implementasi Kebijakan

Berdasarkan narasumber, adanya program PKH ini dengan tujuan untuk mengakomodir para keluarga sangat miskin (KSM) yang belum mempunyai program penunjang pendidikan dan kesehatan yang layak, sehingga pendamping PKH atau koordinator daerah harus bermusyawarah dengan pihak – pihak terkait secara komprehensif supaya terdapat sisi keadilan yang merata di sector pendidikan dan kesehatan dengan catatan harus berdasarkan prosuderal tetapi tidaklah rumit untuk masyarakat sehingga masyarakat tidak akan terbebani lagi terkait dengan procedural mekanisme peraturannya.

Upaya yang dilakukan

Berdasarkan narasumber, kegiatan PKH banyak melibatkan berbagai lembaga pemerintahan dari tingkat pusat baik daerah, dalam pelaksanaannya para stakeholder harus saling bekerjasama cara intensif membantu masyarakat para penerima manfaat menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak nya sebagai penerima manfaat sehingga upaya upaya tersebut yang dilakukan para stake holder terkait dapat di rasakan secara maksimal oleh masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019 di Desa Sindangasih Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dapat peneliti

memberikan simpulan dan saran dan saran sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019 di Desa Sindangasih Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis belum bisa dikatakan berhasil menanggulangi kemiskinan, dana bantuan dan Program PKH belum mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung) yang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal usaha).
2. Hambatan dari Implmenetasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sindangasih Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, di antaranya adalah prosedur yang terlalu rumit dan belum disederhanakan.
3. Upaya yang harus dilakukan sebagai dasar adalah peran serta semua unsur lapisan masyarakat dan pemerintah baik daerah maupun pusat dapat bekerjasama. Suatu program yang hebat sekalipun tidak akan berjalan dengan baik dan optimal tanpa adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta sebagaimana prinsip dari mewujudkan *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Anderson, J. 2004 . *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara* . Jakarta : Kencana Perdana
- Creswell, John.W, 2010. *Reseach and Desigen Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan mixed*. Pustaka Yogyakarta.

- D., Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Edward, III, 2011. *Model Implementasi Kebijakan, Congressional, Quartly press*.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- Nawawi, Prof. Dr. 2010. *Teknik Pengumpulan Data*. Gadjah Mada University Press.
- Millan dan Scumacher, 2003. *Reseach and Design*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Nasution, 2001. *Metode Penelitian Naturakistik Kualitatif*. Tarsito Bandung.
- Nurwati Nunung. 2008. "Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan". *Jurnal Kependudukan Padjajaran, Vol 10, No 1*.
- Riant Nugroho. 2014. "Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang.
- Riduwan, Dr., MBA, 2011. *Sekala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung : Alfabeta CV.
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Subarsono Agustinus. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: konsep, teori dan aplikasi*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 1994. *Kebijakan Publik dan Tranparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. PT. Jakarta : Pustaka Indonesia
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bndung : Alfabeta.
- Sugiyono, Prof. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Alfabeta CV
- Strauss & Carbin, 2003 *Metode Penelitian Bagian 2*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Wayne Parsong 2002. *Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Kencana
- Wiliam, N, Duun, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Winarno, Surakhmad. 1985. *Pengantar Penelitian Ilmiah. Dasar Metode dan Teknik*. Bandung : Tarsito.
- Wahab, 2005. *Analisis kebijakan*. Bumi PT. Jakarta : Bumi Aksara